

PERENCANAAN DAN REIFIKASI PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN KOTA BANDUNG

Oleh :
H. Ade Sadikin Akhyadi *

ABSTRAKSI

Pengembangan Ekonomi Rakyat pada dasarnya adalah menumbuhkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi hanya dapat berjalan dengan didukung demokrasi politik. Berbagai kebijakan ekonomi rakyat saat ini masih dibuat sebagai tindakan koreksi yang juga masih bersifat sangat "Inkrementalis". Artinya setiap tindakan yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi rakyat tidak pernah memecahkan masalahnya secara mendasar. Selama ini masih terjadi komitmen dan pemihakan nyata kepada pengembangan ekonomi rakyat patut diragukan. Banyak aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi rakyat walaupun tampaknya pemerintah tetap merupakan aktor yang terpenting. Aktor pendukung pengembangan ekonomi rakyat di luar pemerintah masih sangat lemah dan perlu diperkuat eksistensinya sehingga diharapkan dapat ikut berperan melakukan fungsinya secara lebih efektif dan dirasakan kehadirannya di tengah-tengah kelompok usaha kecil koperasi.

Kata kunci : Mekanisme pembinaan terpadu penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan

-
- Penulis adalah Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Pendidikan Indonesia, merangkap Kepala Program KKN dan PMM LPM UPI

I. PENDAHULUAN

Pada saat kondisi krisis berlangsung, banyak usaha kecil dan koperasi yang mengalami *kelesuan* hampir di semua lini/sector riil dan berdampak pada penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi sebagai akibat dari berhentinya perputaran usaha. Mengembalikan sektor ini pada kondisi yang semula, memerlukan waktu yang tidak singkat, terutama sekali sangat tergantung pada *proses*

pemulihan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Peta perekonomian yang suram ini akan terus berkepanjangan dan imbasnya dirasakan pula oleh Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat yang dihuni oleh 2,5 juta jiwa, merupakan kota berpenduduk sangat padat. Krisis ekonomi yang tengah berlangsung ini, telah mengubah tatanan perilaku usaha kecil dan koperasi di Kota Bandung. *Perkembangan ekonomi masyarakat*

pada sektor informal, pengusaha kecil dan koperasi menunjukkan adanya proses marginalisasi dan kesenjangan yang makin besar terhadap kelompok ekonomi kuat, dampak pola produksi distribusi yang mengarah pada pola monopolistik kartel. Kelompok pengusaha marginal tersebut cenderung meningkat, sebagai dampak kelemahan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia, permodalan, pemasaran, akses alokasi investasi dan kredit, serta lemahnya pembinaan dan pengembangan.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam konstelasi dinamika perekonomian global yang semakin kompleks dan kompetitif, telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan telah melahirkan nilai-nilai baru, kebutuhan baru, dan perilaku ekonomi baru yang harus mendapat perhatian dari *private sector*. Dalam konteks ini setiap pengusaha kecil dan koperasi harus mampu bersaing dalam *market power* dengan menciptakan berbagai keunggulannya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan daya saingnya setiap perusahaan harus selalu *meningkatkan profil diri sebagai bagian dari corporate culture*. Diantaranya dengan meningkatkan kemampuan sampai dengan internal perusahaan yang makin kreatif dan produktif yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wawasan serta berorientasi *nilai corporate culture modern*.

Esensi dan eksistensi usaha kecil dan koperasi dalam perekonomian di kota Bandung tidak diragukan lagi. Usaha kecil dan koperasi tersebar di enam wilayah Kota Bandung telah mampu menyerap sumber daya dan tenaga lokal. Berdasarkan survey yang dilakukan di lapangan jumlah tenaga kerja yang terserap melalui usaha ini cukup tinggi.

Ambivalensi terhadap kemampuan usaha kecil dan koperasi dengan berbagai fenomenanya terus bermunculan sejalan dengan dinamika perkembangan sektor lain dibidang ekonomi. Secara struktural usaha kecil dan koperasi di Kota Bandung pada umumnya *masih memiliki kelamahan klasik, seperti kelemahan dibidang manajemen, organisasi, pengendalian mutu, kemampuan mengadopsi (alih) teknologi, dan penguasaan teknologi, kesulitan mencari permodalan, tenaga kerja masih lokal, terbatasnya akses terhadap pasar.*

Oleh karena itu, diperlukan data base untuk analisis pengembangan dan rencana strategi alternatif penanganan melalui model-model alternatif yang relevan dengan masalah dan potensi usaha kecil dan koperasi yang ada di wilayah kota Bandung. Data dasar ini perlu dilacak dengan harapan dapat *teridentifikasi* kondisi obyektif jenis dan ragam, masalah, potensi usaha kecil koperasi berdasarkan kewilayahan, membuat data base untuk pemetaan/penyebaran usaha kecil dan koperasi, menganalisis kajian pengembangan usaha kecil / koperasi dari berbagai komponen

menurut *matrikulasi analisis SWOT* (analisis kekuatan, kelemahan, peluang, kendala dan tantangan), sehingga diperoleh data karakteristik dan profil koperasi / pengusaha kecil yang lengkap dan layak dikembangkan, sekaligus dapat merencanakan alternatif *model strategi penanganan* serta pengembangan usaha kecil / koperasi, sesuai dengan masalah, potensi, dan kondisi obyektif di lapangan berdasarkan hasil studi identifikasi dan kajian mendalam.

Dalam Undang-Undang No. 9/1995 tentang Usaha Kecil tercantum pada pasal satu yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Beberapa definisi sektor usaha kecil yang juga memiliki ciri-ciri khusus, kriteria ini berbeda-beda tergantung pada fokus permasalahan yang dituju. Rumusannya adalah pembatasan nilai investasi yang digunakan sebagai kriteria bagi usaha kecil, secara umum kurang memberikan gambaran untuk seluruh industri yang tergolong kecil. Kriteria kuantitatif yang digunakan dalam rupiah sebagai pembatasan kriteria usaha kecil pada waktu tertentu, dengan terjadinya perkembangan nilai uang.

Kriteria usaha kecil dari berbagai Instansi diantaranya (1) Biro Pusat Statistik dilihat dari aspek tenaga kerja industri kecil 5 – 19 orang dan industri rumah tangga < dari 5 orang; (2)

Departemen Perindustrian dilihat dari kategori finansial (1990) nilai asset tidak termasuk rumah dan tanah < Rp. 600 juta; (3) Bank Indonesia (1990) nilai asset tidak termasuk bangunan < Rp. 600 juta; (4) Departemen Perdagangan dari aspek finansial maksimum modal aktif untuk usaha dagang < Rp. 25 juta; (5) Kamar Dagang dan Industri dilihat dari aspek finansialnya untuk perdagangan modal aktif < Rp. 150 juta, turn over < Rp. 600 Juta, pertanian modal aktif < Rp. 150 Juta, turn over < Rp. 600 Juta, konstruksi modal aktif < Rp. 250 juta dan turn over < Rp. 1 Milyar.

Indikator lain dari usaha kecil (Mitserg, 1992) mendefinisikan usaha kecil sebagai organisasi yang memiliki entrepreneurial organization dengan ciri (1) organisasi mereka sangat sederhana; (2) mempunyai karakter khas; (3) tanpa elaborasi; (4) tanpa staf yang berlebihan; (5) pembagian kerja yang kendur; (6) memiliki hirarki manajer kecil; (7) aktivitas hanya sedikit yang diformalkan; (8) sangat sedikit menggunakan proses perencanaan dan, (9) jarang sekali mengadakan pelatihan karyawan dan manajer; (10) pada umumnya sulit membedakan antara aset pribadi dengan aset perusahaan. Di Amerika Serikat menurut *Small Business Administration* ditentukan berdasarkan jumlah penjualan untuk sektor jasa dan karyawan untuk sektor manufaktur. Untuk sektor industri manufaktur dianggap sektor usaha kecil jika karyawannya dibawah 1.500 orang. Di Prancis meng-

gunakan jumlah karyawan jika karyawan kurang dari 10 orang dianggap perusahaan sangat kecil. Jika memiliki 10 – 40 karyawan dianggap perusahaan kecil, dan perusahaan menengah dianggap jika memiliki 50 – 500 orang. Jika karyawan lebih dari 500 orang tergolong perusahaan besar.

Perkembangan ekonomi masyarakat di sektor informal (usaha kecil) / Koperasi) di Kota Bandung menunjukkan adanya proses marginalisasi dan kesenjangan yang makin besar terhadap kelompok ekonomi kuat, dampak pola produksi - distribusi yang mengarah pada pola monopolistik kartel. *Kelompok usaha kecil di Kota Bandung dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang ini cenderung menurun, sebagai dampak kelemahan manajemen usaha, kualitas SDM, permodalan, pemasaran, akses alokasi investasi dan kredit, serta lemahnya pembinaan dan pengembangan.*

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung tidak terlepas dari peranan berbagai sektor didalam mengembangkan potensinya untuk mewujudkan nilai tambah terhadap pembentukan nilai produk domestik regional bruto. Potensi ekonomi yang cukup menonjol di Kota Bandung sampai saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan (33,73%), Sektor industri pengolahan (22,26%) dan sektor jasa-jasa (13,71%). Perkembangan dan pertumbuhan industri di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan yang cukup mantap. Jumlah industri telah berkembang dengan pesat tahun 1995 saja 433 unit

usaha dengan total investasi sebesar 24.017.59 juta rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 6.647 orang. *Sementara kelompok industri kecil termasuk formal dan non-formal sebanyak 9.573 unit usaha (Laporan Perindag Kota Bandung, 1998).*

II. KONDISI OBJEKTIF USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG

Dinamika Usaha kecil di Kota Bandung cukup pesat walaupun akhir-akhir ini dilanda krisis ekonomi yang sangat dahsyat dan berdampak besar pada usaha kecil. Kendatipun demikian tetap sebagian besar bertahan tanpa tergoyahkan / terpengaruh krisis tersebut. Yang menarik dari usaha kecil di Kota Bandung adalah jarang mempunyai perencanaan tertulis mengakibatkan perusahaan kecil tidak dapat memusatkan segala tenaga dan daya untuk mencapai sasaran yang paling menguntungkan. Akibatnya tidak bisa mengukur secara pasti apakah berhasil, gagal, atau sukses. Banyak latar belakang yang mempengaruhi siklus perkembangan usaha kecil, dilihat dari aspek kualitas usahanya masih perlu pembinaan secara intensif.

Potensi dan peluang hidup perusahaan kecil / Koperasi di Kota Bandung sangat besar dan penuh harapan, asalkan mereka mau membuka diri dan memperbaharui diri, serta menyesuaikan gerak hidup usahanya dengan dasar-dasar manajemen modern. Terungkap juga bahwa peranan perusahaan kecil di Kota Bandung

Mutatis mutandis (saling berkaitan) dengan eksistensi ekonomi regional Jawa Barat dan makro tingkat Nasional yang sekaligus merupakan sendi penting atau tulang punggung dalam kehidupan dunia usaha di Kota Bandung.

Dari kenyataan tersebut, menjadi jelas dan sudah tiba waktunya menganalisis kehidupan perusahaan kecil dan koperasi saat ini sekaligus menganalisis masa depannya secara lugas dan gamblang. Apabila usaha kecil dan koperasi cukup potensial dan penuh harapan maka demi ancaman kemasa depan ada baiknya kita analisis berbagai kekuatan dan kelemahan usaha kecil/koperasi saat ini serta bagaimana prospek masa depannya.

Dari hasil analisis ini kita dapat membuat perhitungan tentang bagaimana merencanakan masa depan perusahaan kecil/koperasi, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada serta bagaimana mewujudkan rencana kehidupan masa depannya. Peneropongan secara lugas ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi para pembina pengusaha kecil/koperasi sekaligus sebagai masukan konkrit bagi mereka yang bergerak di perusahaan kecil. Sebab, pada akhirnya keberhasilan atau sukses usaha kecil/koperasi, besar artinya bagi karyawan dan masyarakat, sekaligus menjadi sumbangan konkrit bagi kemajuan ekonomi di Kota Bandung.

Masalah besar yang dihadapi usaha kecil/koperasi saat ini di Kota Bandung adalah keterbatas-

an dana untuk modal kerja atau investasi (perluasan kapasitas produksi), teknologi, dan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, dan kesulitan-kesulitan dalam proses pemasaran dan pengadaan bahan baku.

Analisis kekuatan dan potensi usaha kecil/koperasi di Kota Bandung, yang tangguh dan berumur panjang saat ini telah dimulai dari usaha kecil-kecilan yang sukses karena berbagai faktor, seperti *kejelian, kecemasan menganalisis situasi, tekun, hemat, mampu mengadakan pembaharuan, pembinaan karyawan yang terus menerus, mengikuti pendidikan, dan dalam beberapa hal disebut juga karena "nasib baik".*

Tantangan yang dirasakan oleh pengusaha kecil dan koperasi dalam menghadapi persaingan dimana selera masyarakat lebih menyukai produk-produk import atau buatan Industri Menengah Besar (IMB) yang sudah memiliki merk terkenal, selain dibukanya perdagangan bebas di era global ini, akan semakin menantang para pengusaha kecil/koperasi. Deregulasi PP20/94 menciptakan liberalisasi pasar, iklim bisnis dan persaingan semakin ketat. Faktor situasi eksternal seperti politik, kebijakan pembangunan, kebijakan deregulasi, aspek sosial budaya, kolaborator, kompetitor, dan pengembangan teknologi memberikan peluang sekaligus tantangan bagi usaha kecil/koperasi

Kekuatan dan potensi usaha kecil/koperasi berdasarkan hasil studi di Kota Bandung antara lain : (1) sangat padat karya; (2)

sederhana tradisional skills; (3) produknya bernuansa kultur; (4) menggantungkan pada modal sendiri dan pinjaman dari sumber informal. Dimensi lain dari kekuatan usaha kecil dan koperasi adalah (1) pengalaman bisnis sederhana; (2) tidak birokratis dan mandiri; (3) cepat tanggap dan fleksibel; (4) cukup dinamis, ulet, dan mau kerja keras; dan (5) tidak boros.

Kelemahan/masalah usaha kecil dan koperasi berdasarkan kajian hasil studi lapangan di enam wilayah pada umumnya terbentur pada : (1) *keterbatasan modal dan kesulitan pemasaran (46,9%)*; (2) *kurang keahlian dalam mengelola teknik produksi, tenaga ahli sulit dicari (38,90%)*; (3) *kesulitan dalam pengadaan bahan baku (18,20%)* Hasil analisis pada konteks permasalahan yang dihadapi usaha kecil /koperasi.

Kesulitan yang dihadapi pengusaha kecil dan koperasi juga mencakup informasi mengenai perubahan dan peluang pasar/ manajemen pasar yang ada didalam maupun di luar negeri, dana untuk pembiayaan distribusi pemasaran, dan promosi pengetahuan/ wawasan pengusaha mengenai bisnis, dan akses fasilitas untuk komunikasi sangat terbatas. Dengan keterbatasan ini pengusaha kecil sangat tergantung pada pedagang/pengumpul keliling/pemilik grosir. Peranan koperasi dalam penyaluran bahan baku sangat kecil.

Kesulitan/kelemahan ini akhirnya membentuk lingkaran keterbelakangan yang tidak ber-

ujung pangkal antara lain : cara produksi tradisional, hasil produksi sederhana dan sedikit, keuntungan kecil, modal tidak cukup dan tidak ada jaminan, tidak ada investasi baru, peralatan sederhana, pendidikan rendah, mutu bahan baku rendah. Sedangkan pengaruh -pengaruh dari luar adalah : pasar sempit daya beli rendah, persaingan dari perusahaan / industri padat modal, ketergantungan pada pedagang besar setempat, kemungkinan untuk mendapat kredit tidak memadai, sedikit penawaran alat-alat produksi yang sesuai dengan situasi usaha, kemungkinan pendidikan tidak mencukupi, kurangnya usaha penyuluhan dan pembinaan yang berpedoman pada masalah, dan situasi budaya setempat.

Lingkaran problema ini tingkat pendidikan rendah alat produksi yang sederhana dan mutu bahan baku rendah yang dibarengi dengan cara produksi tradisional mengakibatkan hasil produksi dan keuntungan kecil. Bila keuntungan sedikit, maka modal tidak mencukupi dan tidak ada jaminan untuk mendapatkan modal baru, berarti sulit untuk mengadakan investasi baru, akibatnya hasil produksi tetap rendah. Lingkaran tersebut diperkuat oleh kondisi eksternal. Cara produksi tradisional yang disebabkan pengetahuan serta budaya setempat, mengakibatkan hasil produksi sederhana tidak dapat bersaing dipasaran dengan hasil produksi perusahaan yang padat modal. Ini mengakibatkan hasil penjualan hasil produksi mereka tergantung pada perusaha-

an-perusahaan besar dan keuntungan yang diperoleh perusahaan kecil relatif sedikit.

Kelemahan internal usaha kecil erutama terletak pada manajemen usaha, peralatan dan barang modal, serta peralatan teknis dan desain, sedangkan kelemahan eksternal terletak dalam sistem organisasi antar usaha, jalur distribusi dan jalur pemasaran. Informasi teknis dan informasi pemasaran iklim usaha serta iklim industri dan persaingan yang kurang sehat.

Kelemahan lain yang ditemukan dilapangan adalah (1) tidak / jarang mempunyai perencanaan tertulis; (2) tidak berorientasi / berpedoman ke masa depan, melainkan pada hari kemarin / hari ini; (3) tidak memiliki pendidikan yang tepat / relevan; (4) tanpa pembukuan yang teratur dan neraca rugi/laba; (5) tidak mengadakan analisis pasar yang up to date atau tepat waktu dan mutakhir; (6) kurang spesialisasi atau diversifikasi berencana; (7) jarang mengadakan pembaruan (inovatif); (8) tidak ada atau jarang melakukan pengkaderan; (9) cepat puas diri; (10) keluarga sentris; (11) kurang percaya atau kurang tanggap pada ilmu modern; (12) kurang pengetahuan mengenai hukum dan peraturan.

Peramalan / forecasting dan asumsi berdasarkan kuadran pembobotan SWOT diasumsikan sebagai berikut : (1) berbagai peluang cukup besar diiringi dengan potensi infrastruktur Kota Bandung yang sangat memadai walaupun berbagai ancaman kategorinya

cukup mengganggu dalam menentukan kebijaksanaan usaha kecil dan koperasi; (2) Kelemahan internal usaha kecil dan koperasi cukup tinggi pembobotannya, namun tetap tidak sebanding dengan bobot kuadran kekuatan internal yang lebih dominan/tinggi, artinya usaha kecil dan koperasi akan bertahan walaupun krisis ekonomi dirasakan berat selama ini; (3) berbagai peluang lebih menonjol terbukti angka pembobotan untuk faktor kekuatan internal sangat

Signifikan dibandingkan dengan faktor kelemahan internal.

Usaha kecil dan koperasi yang telah berkembang mengakar di masyarakat serta perluasan lembaga keuangan sekunder dan tingkat lokal termasuk bagian integral dari upaya perkuatan lembaga pendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. Upaya tersebut didukung dengan perlindungan status badan hukumnya serta penyediaan sistem insentif dan kemudahan perijinan. Untuk peningkatan jasa pelayanannya, dilaksanakan bantuan perkuatan manajemen serta permodalan dan penjaminan secara partisipatif, kompetitif, dan adil dengan memilih lembaga yang potensial, kuat dan menjanjikan berdasarkan kinerja masa lalu.

III. ALTERNATIF MODEL STRATEGI PENGEMBANGAN

Pendekatan pembinaan dan pengembangan usaha kecil /koperasi diarahkan pada pengembangan aspek kultural dan aspek struk-

tural. Pengembangan aspek kultural menyangkut (a) kewirausahaan dan wawasan bisnis, (b) pengetahuan dan keterampilan teknologi proses, (c) pengetahuan dan keterampilan manajerial. Aspek struktural mencakup (a) pemasaran hasil produksi, (b) permodalan, (c) organisasi dan (d) desain produk. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan Koperasi lebih ditekankan kepada upaya peningkatan produktivitas, mutu dan diversifikasi produk dengan melalui pengembangan keterampilan produksi yang ditunjang dengan program mekanisme mesin peralatan, pengadaan bahan baku, pembangunan unit-unit percontohan industri/usaha kecil/koperasi. Dalam pembinaan aspek kultural ditingkatkan. Disamping melanjutkan serta meningkatkan kegiatan-kegiatan pembinaan keterampilan teknologi produksi ditambah pembinaan aspek kewirausahaan dan kewira kopersian. Sedangkan aspek strukturalnya dilakukan modifikasi bentuk dan jenis bantuan yaitu : (a) pengembangan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berfungsi sebagai unit percontohan dan pelayanan produksi, (b) pemantapan lokasi usaha berupa sentra, Lingkungan Industri Kecil (LIK), Perkampungan Industri Kecil (PIK), Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK), (c) pembangunan pusat-pusat promosi, (d) sistem keterkaitan produk antara industri kecil dengan industri menengah/besar, (e) penyediaan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL). Selanjutnya dalam pembinaan aspek kultural dikembangkan lagi dengan me-

nambah pelatihan aspek manajerial. Sedangkan dalam aspek kultural dilakukan konsolidasi sarana usaha dengan lebih menentukan kepada (a) pengembangan sentra, (b) memperkuat peran Unit Pelayanan Teknis (UPT), (c) pembangunan sistem informasi bisnis, (d) dukungan sistem pembiayaan, (e) peningkatan sistem keterkaitan kemitraan Bapak Angkat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperlukan dukungan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha kecil maupun aparat pembina yang memiliki kemampuan dan profesionalisme, sehingga dapat diwujudkan koperasi yang kuat dan mandiri serta pengusaha kecil yang tangguh. Untuk itu, maka sistem program pengembangan sumber daya manusia koperasi dan penguasa kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program-program pembinaan dan pengembangan koperasi dan pengusaha kecil itu sendiri. Rancangan pola dan program pelatihan manajemen usaha kecil ini disusun dengan memperhatikan besarnya kebutuhan pelatihan dan pengusaha kecil sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia pengusaha kecil. Adanya berbagai departemen/ instansi/ lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan usaha kecil dan atau pelatihan sumber daya manusia usaha kecil. Berbagai potensi dan aspirasi serta kelemahan dan hambatan yang dimiliki/dihadapi oleh pengusaha kecil dan koperasi. Berbagai pengalaman dan umpan balik dari

program pelatihan usaha kecil selama ini. Dan diperlukan efektivitas dan efisiensi program pelatihan.

Pendekatan pembinaan dan pengembangan terpadu yang disertai dengan berperannya penggerak pengusaha kecil dan koperasi terutama para wirausaha, serta para pengusaha kecil dan koperasi diharapkan akan dapat mengubah lingkaran setan menjadi bola salju menuju kemajuan dan kehandalan. Permasalahan yang paling kritis dalam upaya strategis tersebut adalah menentukan dan melaksanakan strategi alternatif yang tepat untuk menahan kecenderungan penurunan kinerja dan memulai usaha konsolidasi dan pengembangan.

Namun demikian permasalahan tersebut akan dapat diatasi dengan pendekatan yang komprehensif, terpadu dan hati-hati serta melibatkan kerjasama yang baik dari aparat pembina dan penggerak para pengusaha kecil dan koperasi. Secara umum pada setiap usaha kecil dan koperasi, idealnya diagnosa dan terapi harus dilakukan kasus perkasus atau untuk masing-masing usaha. Untuk meningkatkan efisiensi pembinaan upaya minimal yang harus dilakukan adalah mengelompokkan pengusaha kecil dan koperasi berdasarkan kondisi dan tahap perkembangan usaha dan kelembagaannya.

Peranan pelatihan harus ditempatkan secara proporsional dengan memperhatikan siklus kehidupan sumber daya manusia secara umum. Peranan pelatihan

dalam peningkatan SDM pengusaha kecil dan koperasi secara makro, terutama pelatihan anggota, tidaklah begitu strategis. *Pelatihan perkoperasian lebih berperan penting bagi pengelola dan karyawan koperasi.* Pelatihan para anggota akan lebih efektif, jika pelatihan itu diberikan setelah penghasilan anggota telah berada di atas subsisten level dan jika pelatihan tersebut dikaitkan langsung dengan upaya peningkatan kesempatan kerja dan penghasilan secara nyata. Pola pengembangan SDM pengusaha kecil pada dasarnya didekati dari dua sudut, yaitu inisiatif dan upaya masyarakat koperasi dan usaha kecil serta inisiatif dan uluran tangan pemerintah.

Melalui pelatihan yang intensif, SDM yang kualitasnya masih kurang dan secara nasional dalam jangka pendek dan menengah praktis tidak dapat dihindari dan dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan koperasi dan pengusaha kecil. Peningkatan kualitas tersebut harus segera diiringi dengan penempatan dan penggunaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, pemberian imbalan dan ganjaran yang memadai, pembinaan dan bimbingan yang baik, serta pengembangan usaha koperasi dan jenjang karier SDM, agar SDM yang bermutu tidak tergoda dan terpicat untuk keluar dari kegiatan usaha kecil dan koperasi. Maka sasaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelatihan, perlu memanfaatkan sistem dan kelembagaan yang ada. Pemantapan

sistem dan kelembagaan akan menselaraskan, terkoordinasikan, tertata jenjang-jenjang pelatihan, dan juga pengalokasian sumber daya secara optimal.

Dilihat dari segi sistem, program pelatihan manajemen usaha kecil memerlukan suatu kerangka dasar (basic frame work), diantaranya akan terlihat dalam struktur program. Dalam sistem itu nampak keterkaitan, baik keterkaitan lembaga maupun fungsi. Sistem pelatihan yang beraneka ragam tidak menutup kemungkinan ditata dan kemudian dimantapkan menjadi suatu sistem yang dapat diterima dan diimplementasikan pada berbagai kebutuhan. Seiring dengan itu, penataan sistem tersebut sekaligus memantapkan fungsi lembaga sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Lembaga-lembaga pelatihan baik yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat terus dimantapkan menjadi lembaga pelatihan fungsional.

Secara sistemik, pencapaian target dan sarana tersebut diasumsikan bisa diwujudkan melalui perencanaan dan pengembangan secara komprehensif, dengan bertumpu kepada upaya research sebagai alat perencanaan dan pengembangan. Strategi pengembangan usaha kecil dan koperasi, merupakan penggalan dari keseluruhan tahapan perencanaan dan pengembangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha kecil dan koperasi di Kota Bandung.

Strategi pengembangan usaha kecil dan koperasi diadaptasikan berdasarkan hasil pemetaan

wilayah koperasi dan usaha kecil, analisis fenomenologis terhadap potensi serta permasalahan usaha kecil dan koperasi terhadap berbagai komponen usaha dengan menerapkan analisis SWOT. Secara faktual strategi pengembangan usaha kecil dan koperasi ini lebih merupakan suatu model atau kerangka yang bersifat makro, yang mana di dalamnya mengandung komponen : 1) alur proses, 2) dasar atau siklus, 3) metoda kerja, 4) bentuk penanganan, 5) pemeranan (lembaga/instansi, person) serta 6) permasalahan, 7) produk atau hasil yang ingin dicapai (output).

IV. KESIMPULAN

1. Perlu dirancang/ disusun suatu master plan atau Strategi Plan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan secara komprehensif, holistik dan integratif khususnya pada kelompok usaha kecil dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi Kota Bandung;
2. Menumbuhkembangkan demokrasi ekonomi dan hanya dapat berjalan kalau didukung oleh demokrasi politik;
3. Tidak pernah menyelesaikan masalah usaha kecil dan koperasi secara mendasar, dan selama ini masih terjadi komitmen dan pemihakan nyata kepada pengembangan ekonomi rakyat yang patut diragukan;
4. Aktor pendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi (EKORA) diluar

- pemerintah masih sangat lemah dan perlu diperkuat. Demikian pula ekonomi rakyat agar menjadi agenda dalam penyusunan kebijakan;
5. Perlu memantapkan sistem dan kelembagaan yang ada, untuk menselaraskan jenjang pelatihan dan juga pengalokasian sumber daya secara optimal;
 6. Penyempurnaan pola koordinasi, perlu mengacu pada pembagian tugas pokok dan tanggung jawab yang jelas antar dinas teknis terkait yang menangani ekonomi kerakyatan terutama untuk pelatihan SDM.

V. ALTERNATIF KEBIJAKAN

Model dan strategi alternatif pengembangan/penanganan hasil penelitian Perguruan Tinggi/LSM yang perlu di uji cobakan / didesiminasikan di beberapa usaha kecil dan koperasi dalam bentuk pilot proyek, untuk melihat daya ampuh model pembinaan dan penanganan masalah usaha kecil dan koperasi;

1. Perlu adanya rekayasa iklim usaha yang kondusif, dilakukan penelaahan peraturan pemerintah yang mampu mendorong tumbuhnya kegiatan usaha;
2. Langkah-langkah strategis yang patut dipertimbangkan adalah melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan strategis pembangunan ekonomi kota Bandung yang berakar kerakyatan ;
3. perlu memperkuat gerakan pembelaan (advokasi) usaha kecil dan koperasi agar menjadi agenda dalam penyusunan kebijakan;
4. Melakukan studi yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika usaha kecil dan koperasi sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih cepat dan sesuai kebutuhan;
5. Perlu diujai kemungkinan menerapkan pendekatan yang multi agency network dengan berbagai lembaga / pemerintah/BUMN/swasta yang relevan.